

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konflik

1. Pengertian Konflik

Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.

Konflik merupakan gejala sosial yang sering terjadi dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren* yang memiliki arti bahwa konflik dapat selalu hadir dalam setiap ruang dan waktu, kapan saja dan dimana saja. Dalam pandangan ini, masyarakat sebagai arena konflik atau karena pertentangan yang senantiasa berlangsung. Oleh karena itu, Konflik sosial merupakan gejala yang selalu mengisi kehidupan sosial setiap orang. Konflik dipicu oleh perbedaan dan persamaan kepentingan sosial. Konflik sering muncul karena berakar pada kelangkaan ranah sosial yang berbeda, baik itu kekuasaan, status sosial, atau sumber daya.²⁵

“Konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*con*” yang artinya bersama dan “*fligere*” yang artinya *tabrakan* atau *benturan*. Secara umum, istilah konflik mencakup serangkaian konflik dan fenomena konflik, argumen tentang perbedaan atau keinginan atau pendapat individu, dari konflik kelas hingga konflik internasional hingga dapat menimbulkan

peperangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik mempunyai arti percekocan, perselisihan, dan pertentangan.²⁶ Adapun pencegahan konflik merupakan salah satu pendekatan konflik yang berupa mencegah konflik kekerasan. Pencegahan konflik dapat dipahami sebagai salah satu upaya preventif agar konflik agar tidak sampai terjadi kekerasan. Micgael Lund, dalam hal ini memberikan pengertian pencegahan konflik sebagai berikut: “Pencegahan konflik adalah salah satu upaya pencegahan di saat konflik masih berada pada tahanan konflik laten, artinya fase yang di dalamnya belum ada kekerasan yang serius”.²⁷

2. Pengertian Sosial

Manusia disebut sebagai makhluk sosial dikarenakan manusia tidak mampu hidup sendiri serta membutuhkan orang lain. Dari definisi ini, maka dapat diketahui bahwa pengertian sosial memiliki kaitan erat dengan interaksi antar manusia dan lingkungan masyarakat²⁵. Kata sosial berasal dari bahasa latin yaitu *socius* yang artinya adalah segala sesuatu yang lahir, tumbuh serta berkembang di dalam kehidupan secara bersama-sama. Istilah lain dari sosial ialah suka memperhatikan kepentingan umum, seperti suka menderma, menolong dan lain sebagainya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosial merupakan segala hal yang

²⁵ Khoirika Makhmudah, “Pencegahan Konflik Melalui Local Wisdom Studi Model Conflict Preventif”. *Skripsi Semarang UIN Wali Songo*. Tahun 2015.

²⁶ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 746.

²⁷ Skripsi Khoirika Makhmudah, *Pencegahan Konflik Melalui Local Wisdom Studi Model Conflict Preventif* (Semarang: UIN Wali Songo, 2015), 22.

berhubungan dengan masyarakat. Sosial dapat diartikan secara luas, namun secara umum, pengertian sosial dapat diartikan sebagai suatu hal yang ada pada masyarakat ataupun sikap kemasyarakatan secara umum.

Ilmu sosial pun dipelajari sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan, selain ilmu tentang alam atau sains. Apabila didefinisikan, ilmu sosial merupakan ilmu yang membahas mengenai tingkah laku manusia serta masyarakat ketika berinteraksi dengan satu dan lainnya. Dalam ilmu sosial, interaksi sosial merupakan urutan dinamis tindakan sosial yang terjadi antara individu maupun kelompok yang dapat mengubah tindakan serta reaksi individu tersebut karena tindakan yang terjadi oleh mitra interaksinya. Interaksi sosial juga dapat diartikan sebagai pembentuk dasar untuk struktur sosial. Secara umum, interaksi sosial merupakan setiap hubungan yang terjadi antara dua individu atau lebih. Interaksi sosial terdiri dari sejumlah besar interaksi sosial, verbal maupun fisik hingga menciptakan suatu iklim untuk menukar perasaan maupun iden.

3. Pengertian Keagamaan

Keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, seperti perasaan keagamaan atau soal-soal keagamaan. Adapun konflik keagamaan yang terjadi adalah sifat-sifat yang terdapat didalam agama atau segala sesuatu yang berkaitan dengan agama misalnya perasaan keagamaan atau soal-soal keagamaan yang

rentan terhadap percekocokan, pertentangan, dan perselisihan.²⁶ Keagamaan adalah hubungan antara umat beragama baik Islam, Kristen, Hindu yang ada di Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa Konflik Keagamaan adalah adanya perselisihan, permusuhan, pertentangan mengenai soal keagamaan dalam wilayah Desa Paron.

4. Konflik Sosial Keagamaan

Berbicara mengenai sosial keagamaan tentu tidak terlepas dari unsur kata sosial dan agama, yang mengandung unsur masyarakat, budaya, ideologi, dan politik. Begitu pula manusia dikatakan makhluk sempurna karena dianugerahi nurani, kemampuan berfikir, akal, dan ketereampilan, hal tersebut dimiliki manusia demi memperjuangkan eksistensi pertumbuhan dan kelangsungan hidup, dan untuk memenuhi kebutuhannya baik secara materi maupun spiritual. Oleh karena itu, manusia yang berbudaya akan selalu menjalin hubungan-hubungan dengan sosial atau masyarakat, agama, ideologi, politik, dan budaya. Untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya manusia perlu mengadakan hubungan antara lain:

- a) Hubungan manusia dengan Tuhan yang kemudian melahirkan agama.

²⁶ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 18.

- b) Hubungan manusia dengan manusia yang kemudian melahirkan sosial.
- c) Hubungan manusia dengan kekuatan yang kemudian melahirkan politik.
- d) Hubungan manusia dengan keindahan yang kemudian melahirkan budaya.

Dunia bagi orang beriman adalah penjara, dalam arti harus menanggung kepahitan dengan pasif, sehingga dengan keyakinan iman seperti itu mereka merasa harus menemukan dunia baru yang menentramkan, yaitu dunia dengan intensitas ritual yang tinggi. Bagi mereka agama memungkinkan untuk melakukan aktualisasi dalam konteks kesalehan pribadi, tetapi jelas tidak fungsional jika keikutsertaan dalam menyelesaikan urusan dunia (sosial) tersebut juga dalam keadaan yang rumit ini. Perubahan ini memang meresahkan, tetapi yang penting bagaimana perubahan sosial itu diangkat menjadi sebuah kesadaran. Memang setiap transformasi sering dimulai dari keresahan yang positif dan akan menjadi basis kesadaran potensial dalam menegakkan tatanan baru yang lebih baik, termasuk di dalamnya tatanan moral dan tatanan sosial keagamaan.

Jika ingin bersikap aktual dalam perubahan kemanusiaan, agama tidak bisa hanya berbicara tentang “dunia nanti” yang memang akan dihadapi setiap manusia, tetapi juga mengenai “dunia sekarang” yang sedang dan segera dihadapinya. Untuk itu, agama harus mampu

menumbuhkan etos dan etik pembangunan harkat kehidupan yang lebih baik. Dalam kaitan ini, inti konsep dosa dan pahala, moralitas (*morality*) dan immortalitas (*immortality*) setelah kematian, harus menumbuhkan tanggung jawab sosial pada diri setiap orang. Dari sini dapat diciptakan orde yang stabil dan berbudaya.

B. Masyarakat Plural

1. Pengertian Masyarakat

M.J. Herskovits menyatakan, masyarakat adalah kelompok individu yang diorganisasikan, yang mengikuti satu cara hidup tertentu. Sedangkan J.L. Gillin dan J.P. Gillin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. S.R. Steinmetz, memberikan batasan mengenai masyarakat sebagai kelompok manusia yang terbesar meliputi pengelompokan manusia yang lebih kecil yang mempunyai perhubungan erat dan teratur. Pendapat dari Maclver yang mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem cara kerja dan prosedur, dari otoritas dan saling membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian-pembagian sosial lainnya, sistem pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan, sistem yang kompleks dan selalu berubah, atau jaringan relasi sosial²⁷. Jadi, masyarakat timbul dari adanya kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan berkerja sama.

²⁷ Beni Ahmad Saebani. *Pengantar Antropologi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 137.

Dalam waktu yang cukup lama itu, kelompok manusia yang belum terorganisasikan mengalami proses fundamental, yaitu:

- a) Adaptasi dan membentuk organisasi tingkah laku dari para anggotanya.
- b) Timbulnya secara lambat, perasaan kelompok atau *lesprit de corps*.

Proses itu biasanya bekerja tanpa disadari dan diikuti oleh semua anggota kelompok dalam suasana *trial and error*. Agar tidak simpang siur dalam menggunakan istilah, kelompok/group di sini adalah setiap himpunan manusia sosial yang mengadakan relasi sosial antara satu dan lainnya sebagai satu resiprositas. Kelompok tersebut belum terorganisasikan secara sadar. Contohnya adalah *crowd*, *class*, *primary* dan *secondary group* dan organisasi besar²⁸.

Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab, yaitu *syaraka* yang artinya ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa inggris masyarakat adalah *society* yang pengertiannya mencakup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem social. Masyarakat juga berarti bahwa kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama²⁹.

²⁸ Ibid, 139.

²⁹ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta,2013). Hlm 32.

2. Pengertian Plural

Kemajemukan atau pluralitas merupakan suatu gejala sosial yang umum ditemui disetiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, diakui atau tidak, disadari atau tidak. Indonesia, sebagai negara kepulauan, sejak awal sudah mentasbihkan diri sebagai bangsa yang multi ras, multi etnik, multi agama, dan multi kebudayaan. Kemajemukan dan pluralitas masyarakat Indonesia, dapat dilihat secara horisontal maupun vertikal.

Secara horisontal, masyarakat Indonesia dapat dikelompokkan menurut agama, ras, etnis, budaya, dan lokalitas. Secara vertikal, masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Kata “plural” berasal dari bahasa Inggris yang artinya “jamak”, ketika kata ini ditambah akhirnya menjadi “pluralitas” ini berarti kemajemukan. Istilah plural atau majemuk sebenarnya berbeda dengan pengertian heterogen. Majemuk atau plural itu merupakan lawan dari kata singular atau tunggal. Masyarakat plural itu bukan masyarakat yang tunggal.

Masyarakat tunggal merupakan masyarakat yang mendukung satu sistem kebudayaan yang sama, sedangkan pada masyarakat plural, di dalamnya terdapat lebih dari satu kelompok baik etnik maupun sosial yang menganut sistem kebudayaan (subkultur) berbeda satu dengan yang lain. Masyarakat kota, mungkin tepat disebut sebagai masyarakat heterogen, sepanjang meskipun mereka berasal dari latar belakang SARA

(sukubangsa, agama, ras, atau pun aliran/golongan-golongan) yang berbeda, tetapi mereka tidak mengelompok berdasarkan SARA tersebut.

Pierre L. van den Berghe dalam Agus Santoso menyebutkan beberapa karakteristik masyarakat majemuk, sebagai berikut; (1) terjadinya segmentasi ke dalam kelompok-kelompok yang seringkali memiliki subkebudayaan yang berbeda satu sama lain, (2) memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer, (3) kurang mampu mengembangkan konsensus di antara para anggota-anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar, (4) secara relatif sering kali mengalami konflik-konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, (5) secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (*coercion*) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi, serta (6) adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain³⁰.

3. Pengertian Masyarakat Plural

Asal mula dari konsep masyarakat majemuk (*plural society*) yang dikenal dalam ilmu-ilmu sosial sebenarnya mengacu pada tulisan Furnival, yang mengidentifikasi masyarakat jajahan Hindia Belanda sebagai sebuah masyarakat majemuk. Masyarakat terdiri atas kumpulan orang-orang atau kelompok-kelompok, yang berbaur tetapi tidak menjadi satu. Setiap kelompok mempunyai agama, bahasa, dan budaya masing-masing. sebagai

³⁰ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013). Hlm 32.

individu mereka saling bertemu, tetapi hanya pada pasar. masyarakat seperti ini terdiri atas bagian-bagian yang merupakan komuniti-komuniti yang hidup saling berdampingan dalam sebuah satuan politik, tetapi saling terpisah atau tidak merupakan sebuah kesatuan.

Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok, yang bertempat tinggal yang sama dalam satu wilayah, tetapi terpisah menurut garis budaya masing-masing. Kemajemukan suatu wilayah patut dilihat dari dua variabel yaitu kemajemukan sosial dan kemajemukan budaya. Kemajemukan sosial ditentukan dari indikator-indikator seperti status, kelas, lembaga, atau *power*. Kemajemukan budaya ditentukan ditentukan dari indikator-indikator genetik-sosial (ras, etnis, suku), budaya (kultur, nilai, kebiasaan), bahasa, kasta, agama, atau wilayah.³¹

Pluralisme bangsa adalah pandangan yang mengakui adanya keragaman di dalam suatu bangsa, seperti yang ada di Indonesia. Isitilah plural mengandung arti berjenis-jenis, tetapi pluralism bukan berarti sekedar pengakuan terhadap hal tersebut. Namun memiliki implikasi sosial, ekonomi, politis. Oleh sebab itu, pluralisme berkaitan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Banyak negara yang mengakui bahwa dirinya negara demokrasi tapi tidak mengakui bahwa adanya pluralism didalam kehidupan sehingga terjadi berbagai jenis segregasi. Pluralism ternyata berkenaan dengan hak hidup kelompok-kelompok masyarakat yang ada

³¹ Ridwan Sa'idi, "Urgensi Menjaga Kemajemukan dan Toleransi Dalam Era Demokrasi", *Jurnal Tpis* Vo. 13 No.02 Juli-Desember 2017.

dalam suatu komunitas. Komunitas tersebut memiliki budaya masing-masing dan perbedaan mereka diakui oleh negara termasuk budayanya.

Pluralisme memiliki makna keanekaragaman atau kemajemukan (meskipun arti yang satu ini tidak semua orang sependapat). Sesungguhnya paham kemajemukan masyarakat atas pluralisme pada hakikatnya, tidak hanya cukup dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan bahwa masyarakat itu majemuk, namun harus disertai dengan sikap tulus menerima kenyataan kemajemukan itu sebagai bernilai positif, dan salah satu rahmat Tuhan kepada manusia, karena akan memperkaya pertumbuhan budaya melalui interaksi dinamis dan pertukaran antar budaya yang beraneka ragam. Pluralisme berarti keanekaragaman tentu saja mencakup hal seperti pluralisme suku, budaya, agama, bahasa, etnis, ras, bangsa dan agama. Diana Eck menjelaskan bahwa pengertian pluralisme tidak sama dengan kemajemukan tetapi pluralisme mengacu pada adanya hubungan saling bergantung antar berbagai hal yang berbeda sedang kemajemukan mengacu kepada tidak adanya hubungan seperti itu diantara hal-hal yang berbeda.³²

Agama bukan saja merupakan pedoman bagi manusia dalam hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan atau Supranatural (*Hablu min Allah*). Tetapi juga merupakan pedoman dalam mengatur hubungan dengan sesama manusia (*hablu min annas*). Bahkan juga memberikan pedoman dalam bersikap terhadap alam lingkungan. Dalam kaitannya dengan

³² Victor I. Tanja, *Pluralism Agama Dan Problema Sosial: Diskursus Theologu Tentang Isu-Isu Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998), 4.

hubungan antar manusia, Elizabeth K. Nottingham mengatakan: “sejarah mencatat bahwa agama merupakan unsur perekat yang mampu mempersatukan suku bangsa yang berbeda ras, adat istiadat, dan sosial budaya”.³³ Meski demikian, sejarah mencatat juga bahwa agama dapat menjadi sumber konflik atau ketegangan di tengah masyarakat, penyebabnya antara lain: berfikir sempit, finatik dan parsial.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa terjadinya beberapa perang antara lain perang salib antar umat Kristen dan Islam (abad ke 11-13), perang antara umat Protestan dan Khatolik di Jerman (1516), di Perancis (1593), Belanda, Spanyol dan beberapa negar Eropa lainnya abad ke-17 dan 18, bahkan di Irlandia Utara perang Protestan dan Khatolik tak kunjung reda sampai dekade delapan puluhan, semuanya adalah akibat faktor agama dan faktor politik.³⁴

Paradigma kebebasan toleransi beragama dalam Islam mengandung ajaran tentang persamaan manusia. Diantara persamaan ini dapat dibentuk persaudaraan dan persahabatan antar pemeluk agama dalam kehidupan sosial berdasarkan kemanusiaan demi terwujudnya ketertiban sosial bersama. Dengan demikian dari sisi kemanusiaan, Islam tidak mengenal eksklusivisme, dan dari sisi akidah, Islam juga tidak mengenal intoleransi. Dalam pergaulan sosial Islam menggariskan kepada umatnya, yaitu tidak boleh berbantahkan dengan penganut agama lain melainkan dengan cara

³³ Elizabeth K. Nottingham, *Sosiologi Agama* (Jakarta: Raja Wali Press, 1985), 42.

³⁴Hamidah, Al-Ukhuwah al-Ijtima'iyah wa al Insaniyah: Kajian terhadap Pluralisme Agama dan Kerjasama Kemanusiaan. *Jurnal* .Vol. 21, No. 2, 2015, 321.

yang sopan dan etis, dan mereka boleh berbuat baik berlaku adil terhadap komunitas agama lain.

Adapun dalam konsep masyarakat plural, istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari, adalah masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah *society* yang berasal dari kata lain *socius*, yang berarti “kawan”. Istilah masyarakat sendiri berasal dari kata arab *syaraka* yang berarti “keikutsertaan, berpartisipasi”.³⁵

Auguste comte mengatakan bahwa masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri.³⁶ Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang khas bagi manusia, sehingga tanpa adanya kelompok, manusia tidak akan mampu untuk dapat berbuat banyak dalam kehidupannya.

Bagi masyarakat Indonesia, kemajemukan merupakan yang tidak dapat ditolak, bahwa semua orang bertetangga dengan orang lain yang berbeda suku, agama, budaya, dan seterusnya. Namun, dalam pengertian sebenarnya, pluralisme tidak sekedar dalam pengertian bahwa semua perbedaan itu ada, tetapi perbedaan tersebut menjadi suatu pandangan hidup, sebuah cita-cita, dan sebuah dasar pijakan dalam kehidupan

³⁵ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009),108.

³⁶ Abdul Syani, *Sosiologi (Skematika, Teori, Dan Terapan)* (Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2002), 31.

bersama.³⁷ Namun, karena sifat agama yang dinamis yang harus dikembangkan, baik lewat dakwah atau misi, pluralitas tersebut disamping berdampak positif, seringkali menjadi titik rawan konflik yang dimanfaatkan dan diklaim turut memicu terjadinya konflik-konflik dalam perjalanan sejarah bangsa ini.

Masyarakat plural, multikultural, majemuk merupakan fenomena masyarakat modern, interaksi yang terjadi antara ras, suku, dan etnis, semakin menguat seiring pertumbuhan globalisasi dan modernisasi. Peradaban ini sudah sejak lama mempraktikkan prinsip-prinsip kemajemukan. Arkeologi gagasan tersebut dapat dianut sejak Nabi Muhammad SAW merintis terbentuknya masyarakat di Madinah. Melalui *ash-shahifah al-madinah* (Madinah *charier*), Nabi SAW berusaha mencari titik temu antara kepentingan golongan, kabilah dan agama di Madinah. Langkah pertama Nabi SAW adalah dengan mengakui hak kelompok dalam dokumen “konsitusi Madinah”, Hal sama juga dilakukan khalifah Umar dan sikapnya terhadap penduduk Yerussalem yang terdokumenetasikan dalam “piagam Aelia” (nama lain Yerussalem).

Teladan Nabi (sunah) secara estafet dipraktikkan oleh kholifah umar dan berlangsung pada periode kholifah Umawi di Andalusia (spanyol) yang memperlakukan politik kemajemukan yang gemilang. Catatan sejarah Umawi di Spanyol mendapat sanjungan Max Dimont yang

³⁷ Machasin, *Islam Dinamis Islam Harmonis, Lokalitas, Pluralisme, Terorisme* (Yogyakarta: LKiS, 2011), 321

menyebutnya sebagai rahmat yang mengakhiri kezaliman dan pemaksaan agama.

Teladan Nabi SAW dimasa keemasan Islam kini tinggal sejarah. Berdasarkan hal tersebut, dapat menarik relevansinya dengan kondisi riil Indonesia saat ini. Pluralisme dan kemajemukan dinegeri kita semestinya menjadi berkah, bukan sebaliknya. Peristiwa-peristiwa konflik terakhir mengoyak rajutan kebangsaan Indonesia.

C. Konsep Kerukunan Umat Beragama

Menurut pasal 1 ayat (1) peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no. 9 dan 8 tahun 2006 kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dan pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1995.³⁸

1. Pengertian Kerukunan Umat Beragama

Secara etimologis kata kerukunan berasal dari bahasa Arab, yaitu “*rukun*” yang berarti tiang, dasar, sila. Jamak dari *rukun* ialah “*arakan*” yang berarti bangunan sederhana yang terdiri atas berbagai unsur. Jadi,

³⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1995.

kerukunan itu merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur yang berlainan dan setiap unsur tersebut saling menguatkan.³⁹

Kerukunan umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

2. Toleransi Menuju Kerukunan

Dalam percakapan sehari-hari seolah tidak ada perbedaan antara kerukunan dengan toleransi. Sebenarnya, antara kedua kata ini, terdapat perbedaan, namun saling memerlukan. Kerukunan mempertemukan unsur-unsur yang berbeda, sedang toleransi merupakan sikap toleransi dari kerukunan. Tanpa kerukunan, toleransi tidak pernah ada, sedangkan toleransi tidak pernah tercermin bila kerukunan belum terwujud.

Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris, “*tolerance*” berarti bersikap membiarkan, mengakui dan menghormati keyakinan orang lain tanpa memerlukan persetujuan. Bahasa Arab menerjemahkan dengan “*tasamuh*” berarti saling mengizinkan, saling memudahkan.⁴⁰ Jadi toleransi mengandung konsensi. Artinya, pemberian yang hanya didasarkan kepada kemurahan dan kebaikan hati dan bukan didasari kepada hak.

Toleransi statis adalah toleransi dingin tidak melahirkan kerjasama.

Bila pergaulan antara umat beragama hanya dalam bentuk statis, maka

³⁹ H. Said Agil Husin Al Munawar, *Fikih hubungan Antar agama* (Jakarta:Ciputat Press, 2003), 4

⁴⁰ Al-Munawar, *Fikih Hubungan*, 1.

kerukunan antara umat beragama hanya dalam bentuk teoritis. Toleransi dinamis adalah toleransi aktif melahirkan melahirkan kerjasama untuk tujuan bersama, sehingga kerukunan umat beragama bukan dalam bentuk teoritis, tetapi sebagai refleksi dari kebersamaan umat beragama sebagai satu bangsa.

D. Teori Struktural Fungsional Agil Talcot Persons

Dalam penelitian ini, fenomena di lapangan akan dibedah menggunakan teori yang dikemukakan oleh tokoh sosiologi modern Talcott Parsons, yaitu teori struktural fungsional yang termasuk dalam paradigma fakta sosial. Teori Struktural Fungsional ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam keilmuan sosial termasuk sosiologi di abad modern hingga sekarang. Dimana teori ini berbicara bahwa masyarakat merupakan bagian dari suatu sistem sosial yang terdiri dari struktur-struktur yang saling berkaitan dan menyatu sehingga akan menimbulkan keseimbangan. Teori struktural fungsional ini lebih menekankan pada keteraturan sistem atau struktur. Teori ini lebih memfokuskan kajiannya pada suatu fakta sosial terhadap fakta sosial yang lainnya.⁴¹

Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Parson ini pada mulanya lebih familiar disebut dengan teori integrasi, karena teori tersebut membahas tentang integrasi sosial yang terjadi di dalam suatu

⁴¹ George, Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), 21.

masyarakat. Elemen masyarakat menyatu dengan sistem yang ada di dalamnya dan berfungsi dengan baik sehingga mampu tercipta suatu keseimbangan. Ketika masyarakat hendak menciptakan suatu kestabilan dan keharmonisan dalam lingkungan atau dalam suatu lembaga, maka struktur dan sistem yang ada di dalamnya harus fungsional. Karena tujuan utama dari teori struktural fungsional Talcot Parsons ini yaitu menciptakan suatu keteraturan sosial dalam masyarakat. Teori ini memandang bahwa integrasi dalam masyarakat akan berjalan dengan baik dan normal jika elemen atau actor-aktor yang berkaitan mampu menjalankan fungsi dan strukturnya dengan semestinya.⁴²

Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons beranggapan bahwa setiap struktur dalam sistem sosial pada masyarakat akan berfungsi pada tatanan atau struktur yang lainnya, sehingga apabila suatu sistem atau struktur pada suatu masyarakat tersebut tidak ada atau tidak berfungsi, maka undang-undang dalam masyarakat pun tidak akan ada atau bahkan hilang dengan sendirinya. Begitupun sebaliknya, ketika masyarakat tidak dapat memerankan fungsinya dengan semestinya, maka struktur tersebut tidak akan berjalan. Karena struktur dan fungsi dalam suatu masyarakat sangat berhubungan erat dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Teori struktural fungsional memandang bahwa realitas sosial adalah sebagai hubungan sistem, yaitu sistem masyarakat yang berada

⁴² Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan*, 25.

didalam keseimbangan, yaitu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Sehingga ketika sistem atau struktur sosial mengalami suatu perubahan, maka akan menimbulkan perubahan pula pada sistem yang lainnya. Teori ini beranggapan bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat yang lainnya. Perubahan yang muncul dalam suatu masyarakat akan menimbulkan perubahan pula pada masyarakat yang lainnya. Teori ini mengkaji fungsi atau peran suatu institusi sosial ataupun struktur sosial serta tindakan sosial tertentu dalam suatu masyarakat dan mengkaji pola hubungannya dengan komponen-komponen sosial lainnya. Dalam pembahasan mengenai teori struktural fungsional, Talcot Parsons menjelaskan bahwa sistem sosial yang ada dalam masyarakat terdiri atas beberapa aktor individu, dimana aktor individu tersebut melakukan interaksi dengan individu lainnya secara terstruktur dalam suatu intitusi atau lembaga. Parsons dengan teori struktural fungsionalnya memfokuskan kajiannya pada beberapa sistem dan struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat yang saling mendukung untuk menciptakan suatu keseimbangan yang dinamis.⁴³

Dalam teori struktural fungsional yang telah dikemukakan oleh Talcot Parson ini terdapat empat konsep yang familiar dengan singkatan AGIL yang harus dimiliki oleh suatu sistem atau struktur, yaitu

⁴³ George Ritzer & Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta : Prenada Media, 2005), 83.

Adaptation (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* (pemeliharaan pola).

1. *Adaptation* (adaptasi)

Adaptasi adalah dimana suatu sistem atau struktur sosial, harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar serta menyesuaikan lingkungan tersebut dengan kebutuhannya.

2. *Goal attainment* (pencapaian tujuan)

Merupakan sebuah sistem atau struktur sosial harus mampu mendefinisikan dan meraih tujuan utamanya.

3. *Integration* (integrasi)

Integrasi adalah suatu sistem atau struktur sosial harus bisa mengatur antar hubungan yang komponennya dan harus bisa mengelola antar hubungan ketiga fungsi lainnya (*adaptation*, *goal attainment*, *latency*), sehingga akan menciptakan suatu hubungan persatuan yang harmonis antar komponen.

4. *Latency* (pemeliharaan pola)

Pemeliharaan pola adalah suatu sistem atau struktur sosial harus mampu memelihara, memperbaiki dan melengkapi baik motivasi kepada individu ataupun tatanan kebudayaan.⁴⁴

Empat konsep yang telah dijelaskan di atas ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sistem atau struktur sosial dalam masyarakat, empat konsep tersebut sangat dibutuhkan agar suatu sistem atau struktur

⁴⁴ Ritzer, *Teori Sosiologi*, 54-55

sosial dapat terus bertahan. Selain itu sistem sosial dalam masyarakat harus mempunyai struktur dan undang-undang yang jelas, sehingga akan dapat beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya. Teori struktural fungsionalisme ini memfokuskan pada struktur masyarakat dan antar hubungan dari berbagai struktur tersebut yang saling mendukung menuju keseimbangan yang dinamis. Kajian tersebut dikonsentrasikan pada bagaimana cara masyarakat dalam mempertahankan suatu keteraturan dengan berbagai elemen.⁴⁵

Dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa teori struktural fungsional merupakan teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial pada sistem atau struktur dalam suatu masyarakat. Dimana dalam sistem sosial harus ada suatu struktur yang berfungsi dengan baik dan berjalan secara terus menerus sehingga nantinya sistem tersebut dapat menciptakan suatu hubungan yang seimbang dan harmonis melalui empat konsep yang disingkat menjadi AGIL.

⁴⁵ Ritzer, *Teori Sosiologi*, 83.